

**PERLINDUNGAN DEMOKRASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN NO.62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGUJIAN
KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

SKRIPSI

Oleh

Aulia Rizki Sabila

NIM. 05020422026



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rizki Sabila
NIM : 05020422026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Perlindungan Demokrasi Oleh Mahkamah Konstitusi
Dalam Putusan No.62/PUU-XXII/2024 Tentang
Penghapusan *Presidential Threshold*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,



Aulia Rizki Sabila

NIM. 05020422026

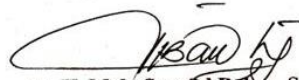
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Rizki Sabila
NIM : 05020422026
Judul : Perlindungan Demokrasi Oleh Mahkamah Konstitusi
Dalam Putusan No.62/PUU-XXII/2024 Tentang
Penghapusan *Presidential Threshold*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Rizki Sabila

NIM. : 05020422026

Judul : Perlindungan Demokrasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.62/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Konstitusionalitas *Presidential Threshold* Perspektif *Fiqh Siyāṣah Dustūriyyah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

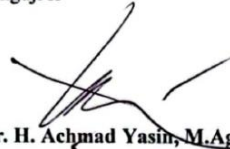
Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.

NIP. 197803152003121004

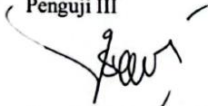
Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji III



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 02 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hikmah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-
8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Rizki Sabila
NIM : 05020422026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik Islam/Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : auliasalsabilla1604@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Demokrasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.62/PUU-XXII/2024
Tentang Pengujian Konstitusionalitas *Presidential Threshold Perspektif Fiqh Siyāṣah*
Dustūriyyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 April 2026

Penulis

(Aulia Rizki Sabila)

ABSTRAK

Pengujian konstusionalitas *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan penting dalam praktik demokrasi konstusional di Indonesia. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden selama ini dipandang membatasi hak politik partai politik dan rakyat, serta cenderung menguntungkan kelompok elite politik tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstusional terkait perlindungan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan demokrasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024; dan kedua, bagaimana perlindungan demokrasi tersebut ditinjau dari pandangan *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait pemilu, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan dokumen ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, serta prinsip hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menjalankan perannya sebagai pelindung demokrasi dengan mengoreksi kebijakan *presidential threshold* yang tidak didasarkan pada rasionalitas yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan politik. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga memperluas ruang partisipasi politik dan mencegah dominasi elite dalam proses pencalonan presiden, sehingga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Dusturiyah*, putusan tersebut selaras dengan *prinsip al'adl* dan *al malahah*, karena berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan, serta pencegahan pemusatan kekuasaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pemilu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum serta menghindari konflik kepentingan politik. Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam menjalankan fungsi pengawalan konstitusi dan demokrasi. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Landasan Teori	21
H. Definisi Operasional	23
I. Metode Penelitian	25
BAB II KERANGKA TEORI PERLINDUNGAN DEMOKRASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	31
A. Teori Negara Hukum	31
B. Teori Demokrasi	37
C. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	41
BAB III PENGATURAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM BERBAGAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU SEBELUM PUTUSAN NOMOR 62/PUU-XXII/2024	45
A. Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	45
B. <i>Presidential Threshold</i> dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi	51

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN DEMOKRASI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NO. 62/PUU-XXII/2024 DAN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	56
A. Analisis Perlindungan Demokrasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.....	56
B. Analisis Perlindungan Demokrasi dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Peraturan Perundang-undangan..... 50

Tabel 2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian *Presidential Threshold*..... 53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Afiyah, Siti. *Ilmu Negara*. Pertama. CV. Pustaka Ilalang Group, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. I. Edited by Leny Wulandari. Jakarta; Sinar Grafika, 2022.
- Amri, Syaiful. *Diktat Fiqh Siyasah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. pert. rev. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ismoyo, Djarot Digdo, Apriyanto, Titik Harryanti, Loso Judianto. *Teori Negara Hukum Modern*. Pertama. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Junaedi, Asep Mahbub. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, Dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press, 2025.
- Laritmas, Selfianus, Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Pertama. Kencana, 2024.

ii. Jurnal

- Adjie Hari Setiawan. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review*, rokilah, vol. 2, no. 2 (November 2019): 235–45. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (September 2017): 15. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.124>.

- Aprilian Sumodiningrat. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Bakri, Riani, dan Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (October 2022): 107–15. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.
- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 2023): 679–93. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.196..>
- Fahira, Yumna. "Sistem Checks And Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (June 2025). <https://doi.org/10.62281>.
- Fendabi, Venu. "Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hadi, Samsul. "Implikasi Hukum Dan Ketatanegaraan Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Terhadap Putusan Mk No. 62/PUU-XXII/2024)Zz." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Igirisa, Jeis, Nurvia Usman, dan Roy Marthen Moonti. "Pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (January 2025): 150–60. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.153>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Meliana. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

- Mochamad Rizky Soeod. "Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (December 2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1309>.
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* (2022) 6, no. 1 (n.d.): 71–83.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi*. Surabaya: Pustaka aksara, 2023.
- Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, dan Mukhamad Rifa'i. *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. 7 (2024).
- Nugroho, Dwi Wahyu. "Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 2024): 211–18. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.
- Prasetyo, Arian Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2024 Mengenai Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Presidential Threshold." Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Qoroni, Waisol. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (June 2021): 51–65.
- Rafiq Sari, Muhammad Syaiful Anwar, Ndaru Satrio, dan Abrillioga Abrillioga. "Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Polarization of the Presidential Threshold in the Presidential System in Indonesia." *Jurnal APHTN-HAN* 3, no. 2 (December 2024): 133–48. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.162>.
- Reguna, Dicky Kristiadi. "Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Democracy dalam Kewenangan Consitutional Review di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (January 2025): 1858–65. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3960>.

- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (May 2020): 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Rosyidi, Muhammad. *Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. 4, no. 1 (2024).
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Sawitri, Ayu. "Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahalli, dan Ahmadi. *Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara*. n.d.
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.
- Suaib. "Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 2 (March 2025).
- Sulistiono, Sandy, dan Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (September 2023): 333. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.
- Sumual, Alvianus Kristian, Mario Gerson Lontaan, dan Yandi Supit. "Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 2 (May 2023): 103–12.
- Supriatno, Eko. "Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia." *Kalodran (Jurnal Ilmu Komunikasi)* 3, no. 1 (2024): 1–9.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Edisi pertama. Edited by Nunuk Nuswardani. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *LEX ET*

SOCIETATIS 1, no. 1 (March 2013).
<https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.

Yasin, Mohd. “Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (December 2023). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.618>.

Yuliansa, Dobi, Joni Helandri, Athika Nur Aulia Sahary, Yuni Pusfitasari, dan Hodijah Artika. “Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (August 2024): 39–60. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888>.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

iv. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, tentang Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

v. Data Elektronik

“Fadli Zon: ‘*Presidential Threshold*’ Cermin Oligarki Partai.” *Antara* Sumbar. February 13, 2013, akses 30 September 2025

“Saldi Isra: Presidential Threshold Bisa Bikin Pemerintah Otoriter.” *Tempo*. September 30, 2025. <https://www.tempo.co/politik/saldi-isra-presidential-threshold-bisa-bikin-pemerintah-otoriter-997680>.